



Analisis Ketimpangan Ekonomi dan Klasifikasi Wilayah di Pulau Kalimantan Tahun 2014-2025

Ambarwati Maisaroh¹, Choirul Amin^{1*}

¹ Program studi geografi, Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

*korespondensi e-mail: ca122@ums.ac.id

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan ekonomi antara kabupaten/kota induk dan pemekaran di Kalimantan tahun 2015-2024 serta memetakan posisi berdasarkan struktur ekonomi daerah pemekaran. Metode penelitian menggunakan Indeks Theil untuk mengukur ketimpangan berbasis PDRB per kapita dan jumlah penduduk dan Tipologi *Klassen* untuk mengklasifikasikan daerah menurut pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan kabupaten/kota induk dan pemekaran tingkat rendah–menengah namun tidak seragam antarwilayah. Kalimantan Barat relatif rendah dan stabil, dengan klaster Mempawah–Landak–Kubu Raya tertinggi, Kalimantan Tengah sangat rendah dengan rentang 0,000-0,016. Kalimantan Selatan menunjukkan perbedaan antarwilayah induk–pemekaran yang kontra, Kotabaru–Tanah Bumbu serta Banjar–Banjarbaru sangat rendah dan Hulu Sungai Utara–Balangan tinggi tetapi menurun. Kalimantan Timur dengan Paser–Penajam Paser Utara tertinggi. Kalimantan Utara sangat rendah mendekati nol. Hasil pemetaan Tipologi *Klassen* mengindikasikan banyak daerah pemekaran berada pada Kuadran 1 (maju & cepat tumbuh) dan Kuadran 4 (relatif tertinggal). Implikasi kebijakan menekankan pengurangan ketimpangan perlu dilakukan secara menyeluruh, seperti penyebaran manfaat dari pusat kota/industri ke wilayah hinterland, penguatan konektivitas dan layanan dasar, serta diversifikasi ekonomi pada wilayah yang bergantung komoditas.

Kata kunci: Ketimpangan Ekonomi, Pemekaran Wilayah, *Indeks Theil*, Tipologi *Klassen*.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses perubahan yang terarah menuju kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Menurut Todaro (2011) pembangunan melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku masyarakat, serta lembaga nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan, penurunan kesenjangan, serta penanggulangan kemiskinan. Pembangunan tidak hanya dipandang sebagai upaya peningkatan aspek ekonomi, melainkan mencakup dimensi sosial, budaya, dan lingkungan yang saling berinteraksi secara dinamis. Pembangunan menjadi salah satu hal yang penting dalam kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya (Dewi & Cahyono, 2016). Proses pembangunan yang tidak berjalan merata di seluruh wilayah, akan muncul ketimpangan antarwilayah, di mana sebagian wilayah berkembang lebih cepat sementara wilayah lain tertinggal.

Ketimpangan akibat pembangunan menjadi isu umum di negara berkembang (Anwar, 2017). Menurut Kesuma, dkk (2021), penyebab adanya ketimpangan pembangunan daerah pada dasarnya karena perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis masing-masing daerah. Sebagai negara kepulauan, perbedaan karakteristik topografi dan aksesibilitas mempersulit upaya pemerataan pembangunan dan distribusi investasi secara merata. Indonesia menghadapi konsentrasi aktivitas ekonomi dan pembangunan pada wilayah tertentu, terutama di pusat-pusat pertumbuhan besar seperti Pulau Jawa. Data BPS tahun 2023 menunjukkan Pulau Jawa menyumbang 57,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2024, jauh di atas

Sumatera (22,12%) dan Kalimantan (8,24%) (BPS, 2024). Nilai Indeks Williamson dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 menunjukkan ketimpangan wilayah di Indonesia memiliki variasi yang signifikan antar kelompok wilayah pembangunan. Nilai Indeks Williamson menunjukkan ketimpangan tertinggi berada di Jawa–Bali serta Kalimantan.

Tabel 1. Kesenjangan Antarwilayah Menurut Wilayah Pembangunan

No.	Wilayah Pembangunan	Kesenjangan Antarwilayah Indeks Williamson
1.	Sumatera	0.48
2.	Jawa-Bali	0.73
3.	Nusa Tenggara	0.19
4.	Kalimantan	0.69
5.	Sulawesi	0.17
6.	Maluku	0.08
7.	Papua	0.15

Sumber: RPJMN 2020-2024

Kalimantan yang dikenal kaya akan sumber daya alam dan kepadatan penduduk rendah justru menempati posisi kedua dengan ketimpangan tinggi (0,69) setelah wilayah Jawa-Bali (0.73), mencerminkan adanya ketidakmerataan pembangunan antardaerah di dalam pulau tersebut. Ketimpangan ekonomi dilihat dari PDRB, menunjukkan di Kalimantan Timur satu kabupaten/kota menyumbang hampir 48% dari nilai tambah regional pada 2023, sementara wilayah pemekaran lain hanya menyumbang sebagian kecil (BPS, 2024). Disparitas ini semakin menguat dengan adanya efek aglomerasi ekonomi, dimana aktivitas ekonomi cenderung mengelompok di wilayah yang sudah maju, sementara daerah terpencil semakin sulit menarik investasi dan mengembangkan sektor ekonomi produktif. Wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi, memperlebar jarak ketimpangan antarwilayah.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah telah lama menerapkan kebijakan desentralisasi melalui pemekaran daerah. Kebijakan ini merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang menggeser pendekatan dari sentralisasi ke desentralisasi, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola potensi dan sumber dayanya secara mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tujuan pemekaran adalah untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Secara administratif, seluruh provinsi di Kalimantan telah mengalami pemekaran kabupaten, dan pada tahun 2012, Kalimantan Utara resmi berdiri sebagai provinsi baru hasil pemekaran dari Kalimantan Timur.

Tabel 2. Kabupaten Induk dan Pemekaran di Kalimantan

Provinsi	Kabupaten/kota Induk	Kabupaten/kota Pemekaran	Wilayah
Kalimantan Barat	Kabupaten Mempawah	Kabupaten Landak; Kabupaten Kubu Raya	1
	Kabupaten Ketapang	Kabupaten Kayong Utara	2
	Kabupaten Sintang	Kabupaten Melawi	3
	Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sekadau	4
	Kabupaten Sambas	Kabupaten Bengkayang; Kota Singkawang	5
Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten Sukamara; Kabupaten Lamandau	1
	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kabupaten Seruyan; Kabupaten Katingan	2
	Kabupaten Kapuas	Kabupaten Pulang Pisau; Kabupaten Gunung Mas	3
	Kabupaten Barito Selatan	Kabupaten Barito Timur	4
	Kabupaten Barito Utara	Kabupaten Murung Raya	5
Kalimantan Selatan	Kabupaten Kotabaru	Kabupaten Tanah Bumbu	1
	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Balangan	2
	Kabupaten Banjar	Kota Banjarbaru	3
Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Barat; Kabupaten Kutai Timur; Kota Bontang	1
	Kabupaten Kutai Barat	Kabupaten Mahakam Ulu	2
	Kabupaten Paser	Kabupaten Penajam Paser Utara	3
Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan	Kabupaten Malinau; Kabupaten Nunukan; Kabupaten Tana Tidung; Kota Tarakan	1

Sumber: BPK RI, 2025

Efektivitas kebijakan pemekaran dalam mengurangi ketimpangan masih menjadi perdebatan. Pemekaran diharapkan dapat mengurangi rentang kendali pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, hasil penelitian Cassidy & Velayudhan (2022) menunjukkan pemekaran menurunkan PDB di kabupaten baru dalam jangka pendek-menengah. Evaluasi yang dilakukan Ditjen Otda tahun 2011 menunjukkan sebagian besar Daerah Otonom baru (DOB) belum menunjukkan kinerja yang optimal. Selain itu, dinamika pembangunan di Kalimantan masih menjadi sorotan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, seperti tingginya ketergantungan pada sektor hulu, lambatnya hilirisasi industri, keterbatasan infrastruktur, layanan dasar, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kalimantan yang masih didominasi oleh ekstraksi sumber daya alam mentah menyebabkan *multiplier effect* pembangunan ekonomi tidak tersebar merata ke seluruh wilayah, melainkan terkonsentrasi pada lokasi-lokasi ekstraksi.

Studi penelitian Lewis (2017) menyebutkan pemekaran daerah tidak menunjukkan adanya perbaikan layanan pendidik dan memberikan penurunan akses air bersih. Hasil Halimatusa'diyah (2020) menunjukkan wilayah hasil pemekaran memiliki angka kematian ibu yang lebih tinggi dikarenakan kapasitas layanan dan tata kelola yang lemah. Pemekaran berdampak positif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan regional (Siburian, 2020). Pemekaran berkontribusi pada penurunan kemiskinan (Siburian, 2022). Studi ketimpangan di Indonesia dilakukan dalam unit nasional/provinsi atau melakukan dekomposisi Theil menurut wilayah/kawasan, bukan menurut status administratif “induk dan pemekaran”. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketimpangan ekonomi antara kabupaten/kota induk dan pemekaran dan memetakan posisi kabupaten/kota pemekaran dengan Tipologi *Klassen*. di Kalimantan selama periode 2015-2024 untuk mengevaluasi dampak jangka menengah pasca-pemekaran.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan dua analisis yaitu Indeks Theil untuk mengukur ketimpangan dan Tipologi *Klassen* untuk memetakan posisi daerah berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi (r) dan PDRB per kapita (y). Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015-2024. Unit analisis penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Pulau Kalimantan yang berstatus induk maupun pemekaran.

Indeks Theil digunakan untuk menghitung ketimpangan ekonomi suatu wilayah (di dalam satu klaster induk–pemekaran) setiap tahun. Indeks Theil dihitung berdasarkan PDB per kapita dengan jumlah penduduk. Rumus dari Indeks Entropi Theil sebagai berikut (Kuncoro, 2004).

$$I(y) = \sum (y_j/Y) \times \log [(y_j/Y) / (x_j/X)]$$

Keterangan:

- I** = Indeks Entropi Theil
- y_j = PDRB per kapita kabupaten
- Y** = Rata-rata PDRB per kapita Provinsi
- x_j = Jumlah penduduk kabupaten
- X** = Jumlah penduduk provinsi

Tipologi *Klassen* digunakan untuk menggambarkan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi tiap wilayah berdasarkan klasifikasi. Klasifikasi dalam daerah berdasarkan dua indikator yaitu pertumbuhan ekonomi (x) dan pendapatan per kapita daerah (y) yang dihitung rata-rata dari tahun 2015-2024. Tipologi *Klassen* dibagi menjadi 4 kuadran:

Tabel 3. Matrik Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi *Klassen*

PDRB per Kapita (y)	Pertumbuhan Ekonomi (r)	
	ri > y	ri < y
yi > y	Kuadran I: Daerah maju dan cepat tumbuh	Kuadran II: Daerah maju tapi tertekan
yi < y	Kuadran III: Daerah berkembang cepat	Kuadran IV: Daerah relatif tertinggal

Sumber: Sjafrizal (2008) dan Kuncoro (2015) (dalam Masbiran, 2019).

Kuadran 1 (maju dan cepat tumbuh) adalah ketika pertumbuhan ekonomi daerah lebih tinggi daripada acuan dan PDRB per kapitanya juga lebih tinggi daripada acuan. Kuadran 2 (maju tapi tertekan) terjadi ketika PDRB per kapita daerah lebih tinggi daripada acuan, tetapi pertumbuhan ekonominya lebih rendah. Kuadran 3 (berkembang cepat) muncul ketika pertumbuhan ekonomi daerah lebih tinggi daripada acuan, tetapi PDRB per kapitanya masih lebih rendah. Kuadran 4 (relatif tertinggal) adalah ketika pertumbuhan dan PDRB per kapita daerah keduanya lebih rendah daripada acuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menggambarkan ketimpangan antar kabupaten/kota induk–pemekaran di Kalimantan periode 2015-2024 berdasarkan Indeks Theil dan peta Tipologi *Klassen*.

1. Indeks Theil

Tabel berikut menyajikan nilai Indeks Theil antar kabupaten/kota induk–pemekaran di setiap provinsi di Kalimantan periode 2015-2024.

Tabel 4. Indeks Theil Kabupaten/kota Induk & Pemekaran Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2023

Wilayah	Indeks Theil									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	0,029	0,030	0,031	0,031	0,031	0,033	0,033	0,034	0,033	0,032
2	0,009	0,010	0,010	0,011	0,012	0,013	0,013	0,013	0,012	0,013
3	0,010	0,011	0,011	0,011	0,012	0,018	0,018	0,018	0,018	0,019
4	0,014	0,014	0,013	0,013	0,012	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
5	0,011	0,010	0,009	0,008	0,007	0,009	0,009	0,009	0,007	0,007

Sumber: BPS Kalimantan Barat, diolah

*wilayah merujuk pada Tabel 2

Berdasarkan nilai Indeks Theil untuk periode 2015-2024, tingkat ketimpangan ekonomi antara kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan tergolong relatif rendah dan stabil, dengan rentang nilai antara 0,007 hingga 0,034. Wilayah 1 yang terdiri dari induk Kabupaten Mempawah dan daerah pemekaran Kabupaten Landak serta Kabupaten Kubu Raya, memiliki nilai Indeks Theil tertinggi dibanding wilayah lain di Provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan ketimpangan paling besar. Ketimpangan ini dipicu oleh lokasi strategis Kabupaten Kubu Raya yang berdekatan dengan Kota Pontianak sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang mendorong aktivitas jasa–perdagangan dan infrastruktur. Sementara Kabupaten Landak masih sangat bergantung pada sektor primer pertanian sebagai penopang utama ekonominya. Wilayah 2 mencakup Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, mengalami fluktuasi nilai Indeks Theil. Perbedaan kemakmuran antardaerah tetap kecil, namun masih ada kecenderungan pelebaran tipis pascapandemi. Wilayah 3 (Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi) dan wilayah 4

(Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang) menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah namun sempat mengalami lonjakan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 mengubah struktur sektoral dan memperlebar kesenjangan antarwilayah di awal periode (Akita & Alisjahbana, 2023). Wilayah 5 (Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang) menunjukkan tren positif dengan menurunnya Indeks Theil dari 0,011 menjadi 0,007 rentang tahun 2014-2019, yang mencerminkan peningkatan pemerataan ekonomi.

Tabel 5. Indeks Theil Kabupaten/kota Induk & Pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2024

Wilayah	Indeks Theil									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,003	0,004	0,004	0,006	0,006
2	0,005	0,006	0,008	0,008	0,011	0,007	0,007	0,009	0,007	0,007
3	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	0,014	0,012	0,011	0,010	0,012	0,015	0,016	0,015	0,015	0,014
5	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003

Sumber: BPS Kalimantan Tengah, diolah

**wilayah merujuk pada Tabel 2*

Ketimpangan ekonomi antara kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikategorikan rendah, dengan nilai Indeks Theil yang stabil pada rentang 0,000-0,016. Wilayah 1 (induk Kabupaten Kotawaringin Barat; pemekaran Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau) dan Wilayah 5 (induk Kabupaten Barito Utara; pemekaran Kabupaten Murung Raya) menunjukkan tingkat ketimpangan yang sangat rendah mendekati nol, menunjukkan adanya homogenitas struktur. Keduanya mengalami kenaikan pasca-2020 namun tetap menjadi yang terendah. Wilayah 2 (induk Kabupaten Kotawaringin Timur; pemekaran Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan) cenderung mengalami penurunan. Wilayah 4 (induk Kabupaten Barito Selatan; pemekaran Kabupaten Barito Timur) merupakan wilayah dengan ketimpangan tertinggi di Kalteng. Penurunan terjadi pada tahun 2014 sebesar 0,014 ke 2017 sebesar 0,010, nilai indek melonjak saat pandemi ke dan bertahan pada kisaran 0,014–0,015 hingga 2023. Pandemi 2020 memperlebar kesenjangan induk–pemekaran di wilayah ini dan pemulihannya lebih lambat dibanding wilayah lain.. Wilayah 3 (induk Kabupaten Kapuas; pemekaran Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas) menjadi wilayah dengan ketimpangan homogen di Kalimantan Tengah, ditandai dengan nilai indeks 0,001-0,000 dan tetap nol sejak 2015-2024.

Tabel 6. Indeks Theil Kabupaten/kota Induk & Pemekaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2024

Wilayah	Indeks Theil									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	0,001	0,002	0,003	0,003	0,006	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
2	0,338	0,330	0,321	0,311	0,302	0,284	0,283	0,285	0,283	0,280
3	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,004	0,005	0,005

Sumber: BPS Kalimantan Tengah, diolah

**wilayah merujuk pada Tabel 2*

Ketimpangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan perbedaan nilai yang tinggi antarwilayah. Wilayah 1 (induk Kabupaten Kotabaru; pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu) dan Wilayah 3 (induk Kabupaten Banjar; pemekaran Kota Banjarbaru) memiliki tingkat ketimpangan yang sangat rendah, bahkan cenderung stabil di angka 0,001–0,006. Nilai yang rendah di Wilayah 1 disebabkan oleh profil ekonomi yang mirip antara kedua daerah pesisir, yaitu sektor ekstraktif dan industri pendukung pelabuhan, yang mendorong konvergensi. Sementara itu, di Wilayah 3, kedekatan profil ekonomi antara

Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru sebagai pusat administrasi/jasa yang saling terhubung dengan kuat menjaga disparitas tetap kecil. Sebaliknya, Wilayah 2 (induk Kabupaten Hulu Sungai Utara; pemekaran Kabupaten Balangan) menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi, namun menurun dari 0,338 menjadi 0,280. Kesenjangan terjadi karena perbedaan struktur dan skala ekonomi. Kabupaten Balangan, sebagai hasil pemekaran, bertumpu pada basis pertambangan yang mengangkat PDRB per kapita, sedangkan Hulu Sungai Utara masih didominasi sektor agraris dan berpenduduk lebih padat, sehingga proses konvergensinya berjalan lebih lambat.

Tabel 7. Indeks Theil Kabupaten/kota Induk & Pemekaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2024

Wilayah	Indeks Theil									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	0,027	0,027	0,026	0,023	0,023	0,009	0,007	0,007	0,008	0,011
2	0,028	0,026	0,026	0,026	0,026	0,028	0,030	0,033	0,035	0,038
3	0,112	0,103	0,099	0,100	0,102	0,129	0,142	0,129	0,096	0,120

Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah

**wilayah merujuk pada Tabel 2*

Indeks Theil di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perbedaan antarwilayah 1 dengan wilayah 2 dan 3. Wilayah 1, yang mencakup induk Kabupaten Kutai (lama) serta daerah pemekaran Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, menunjukkan penurunan ketimpangan yang drastic dari kisaran 0,023–0,027 menjadi 0,009 di tahun 2020. Penurunan ini kemungkinan besar merupakan efek pandemi dan siklus pertambangan yang menekan pusat-pusat industri besar seperti Bontang dan Kutai Timur, sehingga kesenjangan pendapatan per kapita dengan Kabupaten Kutai Barat mengecil. Wilayah 2 (induk Kabupaten Kutai Barat; pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu) menunjukkan pola ketimpangan yang cenderung meningkat. Kenaikan ini terjadi karena perbedaan struktur, aksesibilitas, dan skala ekonomi antara Kutai Barat dan wilayah pedalaman berpenduduk relatif jarang di Mahakam Ulu. Wilayah 3 (induk Kabupaten Paser; pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara) juga memiliki tingkat ketimpangan tinggi yang berfluktuasi. Fluktuasi terjadi akibat eksposur Paser terhadap siklus komoditas (batubara/energi) yang tidak stabil pada periode 2020–2024, serta adanya arus investasi prasarana yang mengikuti penetapan IKN. Sehingga berpotensi mengangkat level pendapatan PPU lebih cepat daripada induknya pada fase awal pembangunan.

Tabel 8. Indeks Theil Kabupaten/kota Induk & Pemekaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2024

Wilayah	Indeks Theil									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	0,005	0,006	0,003	0,001	0,001	0,024	0,024	0,025	0,026	0,028

Sumber: BPS Kalimantan Utara, diolah

**wilayah merujuk pada Tabel 2*

Nilai Indeks Theil di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Ketimpangan antarwilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan mencakup Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung menurun pada tahun 2014-2018 dan naik tinggi di tahun 2019-2025. Hal ini menunjukkan terjadinya pelebaran disparitas pasca tahun 2019 yang berlanjut hingga tahun 2023. Secara historis, Kabupaten Bulungan merupakan induk dari seluruh daerah di Kalimantan Utara. Sebelum pemekaran Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012, semua kabupaten/kota tersebut dimekarkan dari Kabupaten Bulungan. Kota Tarakan resmi menjadi daerah otonom pada tahun 1997 (berdasarkan PP No. 47 Tahun 1997), Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau dimekarkan pada tahun yang sama, yaitu 1999

(berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999), Kabupaten Tana Tidung menjadi kabupaten termuda, dimekarkan pada tahun 2007 (berdasarkan UU No. 34 Tahun 2007). Semua pemekaran ini terjadi saat wilayah-wilayah tersebut masih berada di bawah administrasi Kabupaten Bulungan yang saat itu merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, Kabupaten Bulungan tetap dianggap sebagai kabupaten induk karena secara historis, semua daerah di Kalimantan Utara berasal dari wilayahnya.

2. Tipologi *Klassen*

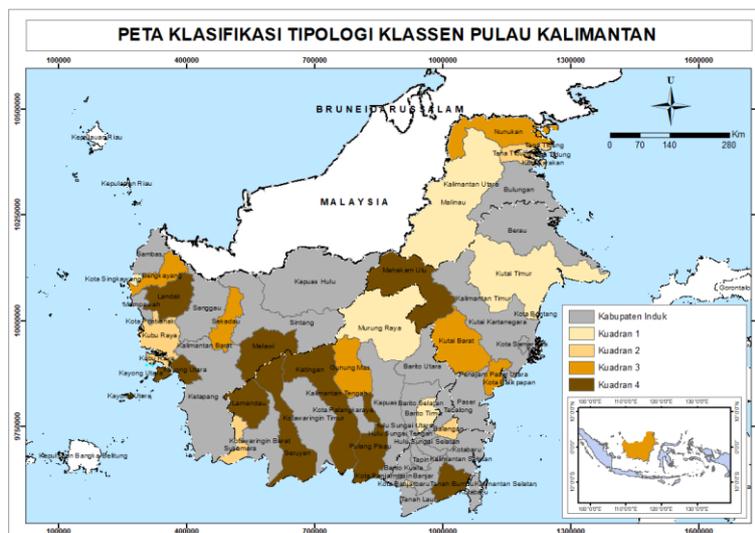
Hasil Tipologi *Klassen* kabupaten/kota pemekaran berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita terbagi menjadi empat daerah klasifikasi: daerah maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal. Hasil tipologi ditampilkan dalam bentuk tabel dan visualisasi peta. Berikut merupakan tabel Tipologi *Klassen* kabupaten/kota di Kalimantan tahun 2015-2024.

Tabel 9. Tipologi *Klassen* Kabupaten/Kota Pemekaran Kalimantan Tahun 2015-2024

Kuadran 1	Kuadran 2
Kota Singkawang; Kabupaten Barito Timur; Kabupaten Murung Raya; Kota Banjarbaru; Kabupaten Kutai Timur; Kota Tarakan; Kabupaten Malinau	Kabupaten Kubu Raya; Kabupaten Sukamara; Kabupaten Balangan; Kota Bontang; Kabupaten Tana Tidung
Kuadran 3	Kuadran 4
Kabupaten Sekadau; Kabupaten Bengkayang; Kabupaten Gunung Mas; Kabupaten Kutai Barat; Kabupaten Penajam Paser Utara; Kabupaten Nunukan	Kabupaten Landak; Kabupaten Kayong Utara; Kabupaten Melawi; Kabupaten Lamandau; Kabupaten Seruyan; Kabupaten Katingan; Kabupaten Pulang Pisau; Kabupaten Tanah Bumbu; Kabupaten Mahakam Ulu

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan, diolah

Visualisasi klasifikasi wilayah berdasarkan Tipologi *Klassen* di Pulau Kalimantan menggunakan peta *choropleth*. Semakin gelap warna pada peta menunjukkan wilayah tersebut semakin tertinggal, sedangkan warna yang semakin terang menunjukkan wilayah tersebut semakin maju. Berikut merupakan peta klasifikasi Tipologi *Klassen* Pulau Kalimantan.



Gambar 1. Peta Klasifikasi Tipologi *Klassen* Pulau Kalimantan

Hasil analisis tipologi *Klassen* pada kabupaten/kota hasil pemekaran di Kalimantan menunjukkan klasifikasi wilayah yang didasarkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB per kapita kabupaten induk dalam kurun waktu 10 tahun (2015-2024). Sebagian besar kabupaten/kota pemekaran terletak pada kuadran 1 (maju dan cepat bertumbuh) dan kuadran 4 (daerah relatif tertinggal dengan PDRB per kapita rendah dan laju pertumbuhan ekonomi yang lambat.). Hal ini menunjukkan adanya polarisasi ekonomi antarwilayah pemekaran, sebagian berhasil mencapai kinerja ekonomi yang optimal sementara sebagian mengalami stagnasi pembangunan.

Kuadran 1 merepresentasikan kondisi ideal dalam pembangunan wilayah. Kota Singkawang; Kabupaten Barito Timur; Kabupaten Murung Raya; Kota Banjarbaru; Kabupaten Kutai Timur; Kota Tarakan; Kabupaten Malinau menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten induknya. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemekaran dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Sejalan dengan hasil penelitian Wisudarni & Riyanto (2021) yang menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah berperan positif dalam menaikkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan PDRB per kapita. Kuadran 1 didominasi wilayah yang mengandalkan sektor tersier, seperti jasa dan perdagangan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. Kota Tarakan, sebagai satu-satunya pusat kota di Provinsi Kalimantan Utara, adalah contoh bagaimana infrastruktur yang memadai berperan penting dalam memacu pertumbuhan. Penelitian Almismary & Wahyono (2020) menunjukkan infrastruktur yang memadai & berkualitas meningkatkan investasi, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Kuadran 2 merupakan dikategorikan sebagai daerah maju tapi tertekan, yang terdiri dari Kabupaten dalam kategori ini, yaitu Kabupaten Kubu Raya; Kabupaten Sukamara; Kabupaten Balangan; Kota Bontang; Kabupaten Tana Tidung. Wilayah kuadran 2 memiliki PDRB per kapita yang relatif tinggi namun laju pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata kabupaten induk. Kondisi ini dapat terjadi karena wilayah-wilayah di Kuadran 2 memiliki basis ekonomi yang sudah matang dan berbasis pada sumber daya alam atau industri yang kuat di masa lalu. Kota Bontang, dikenal sebagai pusat industri gas dan petrokimia dengan PDRB per kapita yang tinggi. Namun, daerah-daerah ini tidak lagi memiliki sumber pertumbuhan baru yang signifikan, baik karena cadangan sumber daya yang menipis, fluktuasi harga komoditas, atau kurangnya diversifikasi ke sektor-sektor lain yang lebih dinamis.

Kuadran 3 merepresentasikan daerah berkembang cepat. Wilayah-wilayah ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun PDRB per kapita mereka masih berada di bawah rata-rata kabupaten induk. Kabupaten dalam kategori ini, yaitu Kabupaten Sekadau; Kabupaten Bengkayang; Kabupaten Gunung Mas; Kabupaten Kutai Barat; Kabupaten Penajam Paser Utara; Kabupaten Nunukan. Kondisi ini menunjukkan daerah berkembang cepat memiliki potensi pengembangan sangat besar namun belum dimanfaatkan optimal (Masbiran, 2019). Potensi yang belum dimanfaatkan ini biasanya berkaitan dengan keterbatasan pada sektor-sektor kunci atau infrastruktur yang belum memadai untuk mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan pendapatan yang merata bagi seluruh penduduk. Hasil penelitian Hernovianty, Pratiwi, & Adventia (2022) Kabupaten Sekadau menekankan tantangan infrastruktur & layanan dasar sebagai faktor penahan kinerja wilayah *binterland*. Wilayah di Kuadran 3 memiliki peluang besar untuk mencapai Kuadran 1 seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Penetapan IKN Nusantara menjadikan PPU sebagai fokus pembangunan intensif pada infrastruktur, konektivitas, dan sektor-sektor strategis. Sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi dalam skala besar.

Kuadran 4 dikategorikan sebagai daerah relatif tertinggal dengan kondisi yang lebih berat, berupa PDRB per kapita rendah dan laju pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Kabupaten yang termasuk dalam kategori ini, seperti Kabupaten Landak; Kabupaten Kayong Utara; Kabupaten Melawi; Kabupaten Lamandau; Kabupaten Seruyan; Kabupaten Katingan; Kabupaten Pulang Pisau; Kabupaten Tanah Bumbu; Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi daerah kuadran IV didominasi sektor primer (pertanian/perkebunan dan kehutanan), sehingga pertumbuhan tidak otomatis terkonversi menjadi kenaikan pendapatan per kapita dan kesejahteraan. Hasil penelitian Rahma dkk. (2021) daerah kaya sumber daya ekstraktif, ketergantungan komoditas berisiko menimbulkan gejala *resource curse* lebih tinggi. Faktor seperti keterbatasan aksesibilitas, infrastruktur yang minim, dan ketergantungan pada sektor primer, serta potensi sumber daya alam dengan nilai tambah rendah sering menjadi penyebab kabupaten/kota di Kuadran 4 cenderung tertahan.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi terhadap kebijakan, ketimpangan induk–pemekaran di Kalimantan umumnya rendah–menengah namun tidak seragam antarwilayah. Daerah berinti kota/industri perlu strategi penyebaran manfaat dari pusat ke hinterland; daerah pedalaman fokus pada strategi penguatan konektivitas dan layanan dasar; wilayah yang bergantung pada komoditas, perlu mendorong diversifikasi ekonomi dan tata kelola fiskal yang lebih tangguh.

Keterbatasan penelitian ini diantaranya, pertama Indeks Theil dihitung atas PDRB per kapita, belum mengoreksi perbedaan biaya hidup antardaerah dan belum menangkap distribusi intrawilayah (antar rumah tangga). Kedua desain penelitian deskriptif–nonkausal, sehingga keterkaitan pemekaran–ketimpangan bukan inferensi sebab-akibat. Ketiga potensi perubahan tahun dasar PDRB dapat menyisakan measurement noise meski sudah distandarkan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan 1) menghitung dekomposisi Theil (antara-kelompok vs dalam-kelompok) agar kontribusi status induk–pemekaran terukur jelas; 2) melengkapi data PDRB per kapita dengan penyesuaian tingkat harga dan indikator rumah tangga (kemiskinan/ketimpangan); 3) memakai desain kuasi-kausal untuk menilai faktor dan dampak pemekaran.

KESIMPULAN

Ketimpangan antara daerah induk dan hasil pemekaran di Kalimantan tergolong rendah. Kalimantan Tengah menunjukkan tingkat ketimpangan yang paling rendah dan stabil, sementara Kalimantan Barat mengalami lonjakan singkat pada tahun 2020 yang cepat pulih. Kalimantan Timur menunjukkan kontras nilai Indeks Theil. Wilayah Kutai Lama (Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kota Bontang) mengalami penurunan ketimpangan pasca-2020. Sementara itu, ketimpangan antara Kutai Barat dan Mahakam Ulu meningkat, dan Wilayah Paser-Penajam Paser Utara (PPU) tercatat sebagai yang tertinggi. Kalimantan Selatan menunjukkan kontras nilai Indeks Theil, dengan dua beberapa wilayah memiliki ketimpangan sangat rendah, sementara wilayah Hulu Sungai Utara-Balangan memiliki ketimpangan tinggi yang kini mulai menurun. Pemetaan menggunakan Tipologi *Klassen* menunjukkan polarisasi yang jelas dalam pembangunan wilayah. Banyak daerah pemekaran berhasil mencapai Kuadran 1 (maju dan cepat tumbuh), sementara banyak lainnya justru berada di Kuadran 4 (relatif tertinggal). Keberhasilan daerah Kuadran 1, seperti Tarakan, Banjarbaru, dan Kutai Timur, membuktikan bahwa pemekaran mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di atas daerah induk. Sebaliknya, wilayah Kuadran 2 yang berstatus "maju tapi tertekan", seperti Kubu Raya dan Bontang, perlu melakukan diversifikasi ekonomi untuk memulihkan momentum pertumbuhannya. Kuadran 3 yang "berkembang cepat", seperti Sekadau dan PPU, menghadapi tantangan untuk mengonversi laju pertumbuhan yang ada menjadi peningkatan kesejahteraan melalui penguatan nilai tambah lokal, konektivitas, dan kualitas SDM. Kuadran 4 yang "relatif tertinggal" membutuhkan penguatan fondasi pembangunan, termasuk perbaikan infrastruktur dasar, layanan publik, dan akses pasar.

REFERENSI

- Akita, T., & Alisjahbana, A. S. (2023). The Initial Impacts of the COVID-19 Pandemic on Regional Economies in Indonesia: Structural Changes and Regional Income Inequality. *Sustainability*, 15(18), 13709. <https://doi.org/10.3390/su151813709>
- Almismary, M. D., & Wahyono, H. (2020). Pengaruh Perkembangan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 16(4), 263-276.
- Anwar, A. (2012). Ketimpangan spasial pembangunan ekonomi dan modal manusia di Pulau Jawa: Pendekatan Explanatory Spatial Data Analysis. *AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship)*, 1(1), 90-109.
- Cassidy, T., & Velayudhan, T. (2022). Government fragmentation and economic growth (MPRA Paper No. 112045). University Library of Munich, Germany.
- Halimatusa'diyah, I. (2020). Does local government proliferation reduce maternal mortality? Evidence from Indonesian sub-national government. *Asian Politics & Policy*, 12(4), 592-616. <https://doi.org/10.1111/aspp.12555>
- Hernovianty, F. R., Pratiwi, N. N., & Adventia, D. (2022). Analisis ketimpangan sosial wilayah di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 17(1), 1-14. <https://doi.org/10.20961/region.v17i1.50815>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Narasi RPJMN 2020-2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *RPJMN 2025-2029* (Lampiran Perpres No. 12 Tahun 2025). Kementerian PPN/Bappenas.
- Kesuma, S. I., Sirojuzilam, Erlina, & ... (2021). How is the income disparity in the context of North Sumatera Province: A conceptual framework. *BIRCI-Journal*, 4(3), 4697-4710.
- Lewis, B. D. (2017). Does local government proliferation improve public service delivery? Evidence from Indonesia. *Journal of Urban Affairs*, 39(8), 1047-1065. <https://doi.org/10.1080/07352166.2017.1323544>
- Masbiran, V. U. M. (2019). Analisis Tipologi Berdasarkan Indikator Fundamental Ekonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 195-211. <https://jkjournal.com/index.php/menu/article/view/25>
- Raafi'i, A., Hakim, D. B., & Putri, E. I. K. (2018). Ketimpangan pembangunan antarwilayah pengembangan di Provinsi Papua Barat. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(3), 244-257.
- Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., & Widjojanto, B. (2021). Fenomena Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.10>
- Siburian, M. E. (2020). Fiscal decentralization and regional income inequality: Evidence from Indonesia. *Asian Economics and Financial Review*, 27(17), 1383-1386. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101493>
- Siburian, M. E. (2022). The link between fiscal decentralization and poverty – Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 81, 1049-0078.
- Sutanto, H. P. (2022). Transformasi sosial budaya penduduk IKN Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 49-56. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.49-56>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic development* (11th ed.). Pearson.
- Wisudarini, S., & Riyanto. (2021). Pengaruh pemekaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(9). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i9.4099>